

Efektivitas Kebijakan Pemerintah Pembangunan Sejuta Rumah (Analisis Pembangunan Hunian Layak Di Kabupaten Bantul Tahun 2019)

**Muhammad Sadam¹, Deni Angela², Muhammad Salman Asaduddin³, Radhita Rasya⁴,
Rita Salsabilla⁵, Shafira Setiawanti⁶**

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

2210413092@mahasiswa.upnvj.ac.id, deniangela@upnvj.ac.id, 2210413094@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2210413090@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210413108@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2210413095@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

The government's policy of building one million houses has been a major focus of Indonesia's efforts to improve access to decent housing for its citizens. Community access to the need for decent housing is a problem that must be immediately found a solution. For this reason, the government launched a one million house program in order to ensure the availability of decent houses for underprivileged residents. The purpose of this study is to evaluate as well as analyze the effectiveness of government policies to build one million houses, focusing on the analysis of rational housing development in Bantul province in 2019. The research method applied is qualitative research through a case study framework by collecting data from various sources relevant to the focus of the study.

The results of the analysis show that the government's policy of building one million houses in Bantul Province has brought many positive results. Construction of decent housing has increased, increasing the number of houses built and increasing the availability of housing for low-income communities. However, there are also some hurdles that must be overcome, such as budget constraints and coordination between central and local governments. This study provides insight into the effectiveness of decent housing development policies in Bantul District. More research is needed to better understand the long-term impact of these policies and possible efforts to improve their efficiency and effectiveness.

Keywords: Development, Policy, Shelter

1. PENDAHULUAN

Pertambahan komposisi jumlah penduduk di tengah masyarakat, semakin mengisyaratkan peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap pemenuhan tempat tinggal. Pada dasarnya, pemenuhan akan tempat tinggal tidak selaras dengan pendapatan masyarakat yang masih tergolong rendah untuk mendapatkan hunian yang layak. Oleh sebab itu, pembangunan hunian yang layak menjadi sangat sulit dilakukan pada saat ini, terutama di daerah perkotaan. Permasalahan tersebut hadir dikarenakan oleh perbandingan yang cukup signifikan antara harga tanah dan komposisi produk bangunan yang semakin mahal, namun tidak sejalan dengan pendapatan yang diterima oleh

mayoritas penduduk kota. Akibatnya, sejumlah masyarakat terpaksa menempati rumah kurang layak huni yang jumlahnya semakin meningkat sehingga menimbulkan terciptanya kawasan kumuh. Pada hakikatnya, pemenuhan masyarakat terhadap tempat tinggal dapat dikatakan sebagai kebutuhan pokok yang patut dipenuhi dikarenakan hunian memiliki peran yang sangat krusial untuk menjadi pedoman pengajaran keluarga, pelestarian budaya, dan pengembangan mutu generasi penerus (Sagitarini, 2017).

Pemerintah saat ini, memiliki fokus utama terhadap berbagai pengembangan infrastruktur untuk dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pada tahap ini, pemerintah memberikan prioritas utama pada infrastruktur pembangunan, yakni ketersediaan jalan, transportasi, dan pemerataan ekonomi desa. Pembangunan tersebut bukan hanya dimaksudkan untuk pertumbuhan ekonomi saja, namun juga memiliki tujuan dalam terciptanya pemerataan penduduk yang bersifat demokratis serta partisipatif (Mulyani, 2016).

Fokus utama yang tercantum dalam rancangan pembangunan dunia adalah mewujudkan kota yang komprehensif, damai, berkelanjutan, dan berdaya tahan tinggi. Hal ini menegaskan pentingnya upaya pengendalian urbanisasi sebagai sebuah momen untuk perkembangan pada masa mendatang. Hal ini juga dapat mengilhami terciptanya kota yang layak, damai, dan asri dengan berhaluan pada karakteristik fisik, kualitas ekonomi, dan kearifan lokal (Wulandari, 2018). Kondisi perkotaan yang geografisnya ditandai oleh tingginya kepadatan penduduk dan ketersediaan fasilitas yang komprehensif sangat kontras dengan kondisi wilayah pinggiran, hal ini mengisyaratkan perlu dilakukannya transformasi lahan perkotaan yang memiliki skala lebih luas dari pada konversi yang dilakukan di pinggiran kota (Lin, 2015). Oleh karena itu, dampak dari tingginya kepadatan penduduk di wilayah urban menghambat kemungkinan terjadinya transformasi lahan perkotaan untuk tujuan pemukiman maupun kegiatan pengembangan ekonomi (Panuji, 2018). Dalam memahami hal tersebut, pemerintah membuat sebuah program yang merancang metode strategis terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berimplikasi terhadap pemenuhan akan hunian di Indonesia.

Berdasarkan data yang dimuat oleh Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2015, dijelaskan bahwa terdapat sekitar 2.51 juta Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam skala nasional. Hal tersebut, diakibatkan oleh keterbatasan kekuatan ekonomi masyarakat dalam memenuhi pembangunan yang hunian layak serta kuantitas lahan yang semakin sedikit di perkotaan sehingga menyebabkan terciptanya hunian tidak layak dan kurang memenuhi syarat. Sementara itu, data yang disajikan BPS di tahun 2014, dijelaskan bahwa didapati angka *backlog* sebesar 14 juta orang dalam hal pemilikan tempat tinggal (BPS, 2013). Dari jumlah tersebut, sekitar 7,6 juta penduduk di Indonesia belum memiliki rumah hunian sendiri. Adapun status kepemilikan tempat tinggal di Indonesia menunjukkan bahwa 69,08% kepala keluarga memiliki hunian pribadi, 6,99% tinggal di kontrakan, 8,87% tinggal di rumah penyewaan, dan 12,08% tinggal di rumah dinas, selebihnya menetap di hunian orang tua atau kerabat.

Penyebab tingginya angka *backlog* hunian di Indonesia dikarenakan kenaikan harga rumah yang melebihi angka inflasi nasional. Keluarga dengan posisi ekonomi yang rendah atau keluarga muda dengan pertumbuhan ekonomi keluarganya yang tidak sejalan dengan angka inflasi akan sangat tertekan oleh kondisi ini. Dalam situasi seperti ini, keluarga dengan posisi ekonomi rendah akan memilih untuk bermukim bersama keluarga atau kerabat, sewa hunian terjangkau yang kurang layak, atau tinggal di rumah kost. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan bahwa keperluan akan tempat tinggal layak sebesar 800-900 ribu unit, yang disebabkan oleh urbanisasi dan pertumbuhan penduduk. Namun, hal tersebut belum dapat terpenuhi secara maksimal dimana hanya sekitar 400-500 ribu unit yang baru terpenuhi, sehingga angka *backlog* terhadap kebutuhan tempat tinggal di tengah masyarakat terus meningkat. Pada dasarnya, terdapat aturan yang mengatur terkait kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat, seperti dijelaskan dalam Pasal 28 H ayat (1) dalam UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap individu berhak hidup sejahtera secara fisik dan mental, memiliki tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang sehat dan baik untuk hidup, serta berhak atas pelayanan kesehatan”. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan rumah layak merupakan hak bagi setiap manusia yang sangat penting diperhatikan untuk meningkatkan kualitas hidup. Namun, sampai saat ini, hak tersebut masih belum sepenuhnya terpenuhi. Angka *backlog* terus meningkat, terutama karena rendahnya permintaan beli masyarakat yakni, pada kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), untuk melengkapi keperluan akan rumah.

Dalam studi kasus yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan ini, penulis bertujuan untuk menelaah efektivitas kebijakan pembangunan sejuta rumah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Pada tahun 2007, angka *backlog* perumahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) lebih tinggi dari pada angka nasional yaitu mencapai 27,5% dibandingkan dengan 19% (Balitbang, 2016). Salah satu penyebab tingginya angka *backlog* perumahan di DIY adalah kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai. Pendapatan yang diterima oleh penduduk DIY tidak sejalan dengan inflasi harga di tengah masyarakat, baik berupa bahan bangunan, tanah, maupun material yang akan digunakan dalam membangun hunian. Penghasilan pendapatan masyarakat DIY pada periode 2008-2009 hanya sebesar 2%-3% per tahun, namun tingkat inflasi mencapai 4% per tahun (BPS, 2016). Hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan penduduk dalam memenuhi kebutuhan rumah dikarenakan mahalnya harga tanah dan bangunan yang sangat diperlukan. Dalam hal lain, angka *backlog* di DIY juga semakin tinggi yang disebabkan banyaknya pembangunan hunian yang dihuni oleh pendatang. Keunggulan yang dimiliki kota DIY baik berupa pariwisata, pendidikan, maupun investasi semakin menarik perhatian bagi masyarakat pendatang untuk menetap, hal ini semakin menunjukkan pertumbuhan perpindahan arus penduduk yang semakin tinggi. Oleh sebab itu, hunian yang dimiliki penduduk semakin tersebar luas serta bertumbuh besar di sekitar DIY, khususnya di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan kondisi ini di tahun 2015, Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan program sejuta rumah dalam upaya pemerintah untuk memberikan perhatian pada masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Program ini dirancang untuk mengurangi angka *backlog* perumahan yang ada di Indonesia. Program sejuta rumah adalah sebuah kebijakan pembuatan perumahan bersubsidi yang dapat diakses bagi kalangan kecil melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi (Balitbang, 2016). Pemerintah juga melakukan upaya untuk peningkatan pembelian masyarakat melalui penurunan uang muka (*down payment*) menjadi 1% berdasarkan harga rumah serta pemberian subsidi dalam membantu kebutuhan masyarakat kecil dalam memenuhi kebutuhan hunian layak. Program Sejuta Rumah bertujuan dalam pemberian kesempatan pada seluruh penduduk, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), untuk mempunyai hunian layak. Hal tersebut didasarkan atas persoalan MBR dalam memperoleh hunian layak, terutama bagi kalangan MBR yang belum mempunyai penghasilan besar serta konsisten tiap bulannya. Salah satu kendala lainnya adalah harga lahan yang semakin meningkat, sehingga harga jual rumah juga semakin tinggi. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mencanangkan Program Sejuta Rumah untuk pemberian kesempatan kepada MBR untuk memperoleh perumahan bersubsidi yang layak ditempati. Dengan demikian, diharapkan Program Sejuta Rumah dapat menjadi solusi untuk MBR dalam memperoleh rumah layak ditempati. Penelitian ini dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat, melalui penelitian ini kita dapat mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam program pembangunan sejuta rumah. Penulisan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dari penelitian terdahulu, karena penelitian ini mampu memberikan penjelasan analitis terkait efektivitas implementasi kebijakan sejuta rumah serta dapat menjadi landasan empiris bagi evaluasi program pembangunan sejuta rumah. Untuk itu, peneliti ingin meneliti lebih mendalam terkait program pembangunan sejuta rumah dalam penulisan jurnal ini.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Relevan

Pada penelitian ini, terdapat berbagai penelitian terdahulu yang akan dijadikan sebagai acuan dalam meneliti permasalahan yang sejenis dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut relevan dan searah dengan apa yang kami teliti sehingga memiliki keterkaitan satu sama lain dan dapat dijadikan suatu acuan dari penelitian ini agar dapat menjadi penelitian yang baik. Penelitian relevan pertama adalah tulisan Gofur, R. R., & Jumiati, I. E. (2021), dalam jurnal tersebut penelitian dilaksanakan dengan cara mengumpulkan literatur yang membahas program sejuta rumah baik dalam jurnal, skripsi, atau lain sebagainya. Hasil yang didapat pada penelitian tersebut menjelaskan bahwa program sejuta rumah dipandang mampu mencapai keberhasilan dan mencapai tujuan yaitu sebagai solusi atas permasalahan yang menjadi latar belakang dari pada diputuskannya program tersebut. Selain itu, program ini juga dipandang memiliki keberhasilan dalam mengurangi angka *backlog* perumahan di Indonesia. Masyarakat sebagai target dilaksanakannya program ini, juga sebagai penerima bantuan, maupun

sebagai sasaran penyelesaian dari permasalahan yang ada, menyatakan bahwa lingkungan dari pada rumah yang dibangun menentukan kenyamanan keluarga (Sanusi, 2018). Namun, di sisi lain terdapat berbagai pendapat mengenai ketidakpuasan pada program sejuta rumah terutama dalam komponen fisik pembangunan yang tidak sesuai dengan standar ataupun yang telah disosialisasikan sebagai syarat atau karakter rumah pada program sejuta rumah.

Penelitian lain yang juga menjadi acuan kami sebagai penelitian relevan dalam menjalankan penelitian kami, yaitu tulisan Agus, F., Fanny, S., & Muliana, R. (2020). Penelitian dalam jurnal tersebut dilakukan dengan metode deskriptif dengan pendekatan campuran. Hasil yang didapat dari pada penelitian tersebut ialah seberapa efektif program pembangunan yaitu perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan di Kota Pekanbaru. Hal itu sejalan dengan program sejuta rumah yang kami teliti pada jurnal kami. Kedua program tersebut memiliki kesamaan dalam tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat. Lagi-lagi permasalahan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia yaitu masalah kesejahteraan yang belum memadai.

Landasan Teori

Efektivitas Program

Efektivitas dapat dikatakan sebagai hal pokok dalam proses pencapaian tujuan maupun haluan yang menjadi fokus utama dalam pembuatan kebijakan baik di organisasi ataupun perhimpunan. Suatu kebijakan yang dibuat dapat dikatakan berhasil jika dalam prosesnya efektif terhadap tercapainya tujuan yang ingin dicapai (Suryani, 2014). Efektivitas program mengacu pada sejauh mana sebuah program mencapai tujuan dan menghasilkan dampak yang diinginkan. Secara lebih lengkap, efektivitas program dapat didefinisikan sebagai kemampuan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang efisien, memadai, dan memberikan manfaat yang signifikan. Efektivitas program melibatkan penilaian terhadap pencapaian hasil atau dampak yang diharapkan dari program tersebut. Program dianggap efektif jika dapat menghasilkan perubahan yang positif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, Baik itu dalam hal meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perilaku, kesejahteraan, atau kondisi sosial dalam kelompok sasaran atau komunitas yang terlibat. Dalam konteks ini, keberhasilan suatu program tidak terlepas dari aspek waktu pelaksanaan yang efisien dan pencapaian tujuan dalam batas waktu yang ditentukan agar program tersebut menjadi efektif (Ding, 2014).

Efektivitas bertujuan untuk menjadi parameter dalam perbandingan antara perencanaan dan pelaksanaan yang ingin dicapai, untuk itu dibutuhkan pengukuran tingkat efektivitas terhadap suatu program yang berguna dalam melihat keefektifan program tersebut (Saragih, 2018). Dengan penjelasan lain, hadirnya efektivitas harus memiliki relevansi terhadap berbagai permasalahan yang ada di dalam tujuan yang ingin dicapai.

Pembangunan

Pembangunan merupakan sebuah proses kebijakan yang bertujuan dalam mensejahterakan serta memajukan kehidupan manusia di dalam segala aspek. Konsepsi pembangunan sangat terkait dalam bidang ekonomi, hal ini dapat dilihat jika suatu pembangunan berhasil, maka dapat dianggap bahwa pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan sisi yang positif. Keberhasilan pembangunan juga berkaitan dengan keadaan penduduk masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Selain itu, kegagalan proses pembangunan dapat timbul akibat lemahnya dukungan masyarakat terhadap kekuatan dan kemampuan dalam pelaksanaan proses pembangunan, hal ini akan berimplikasi pada proses pembangunan bersifat stagnasi yang disebut sebagai (*trapped failure*) (Isran, 2013). Sedangkan menurut (Rogers, 1969), Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas perubahan sosial dalam lingkup luas pada masyarakat yang bertujuan demi kemajuan material serta sosial (mencakup kualitas, keadilan, bertambahnya kebenaran, dan hal lain sebagainya yang dihargai) kepada sebagian besar rakyat dengan kontrol yang cenderung lebih kuat dan mudah didapatkan pada lingkungan masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa definisi dari pada pembangunan yaitu proses perubahan dalam berkembang menjadi lebih baik pada lingkungan masyarakat.

Rumah Layak Huni

Menurut Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 mengenai Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Rumah Layak Huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan memiliki luas bangunan yang mencukupi, serta memperhatikan kesehatan penghuninya. Dalam menilai kelayakan rumah, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi meliputi persyaratan keselamatan bangunan seperti struktur bawah atau pondasi, struktur tengah atau kolom dan balak, dan struktur atas. Selain itu, rumah juga harus menjaga kesehatan penghuninya dengan menyediakan pencahayaan, penghawaan, dan sanitasi yang memadai. Luas minimum yang harus dipenuhi berkisar antara 7,2 m²/orang hingga 12 m²/orang.

Sementara itu, berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 tahun 2011 mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman, konsep rumah layak huni merujuk pada wilayah pemukiman yang melibatkan serangkaian kegiatan, termasuk pembangunan perumahan, pengelolaan wilayah pemukiman, pemeliharaan dan perbaikan, upaya pencegahan serta peningkatan kualitas terhadap permukiman dan perumahan yang berstatus kumuh, penyediaan lahan, pengaturan pendanaan dan sistem pembayaran, serta partisipasi aktif dari masyarakat (Yanto, 2017). Disisi lain, perumahan merupakan cakupan integral dari lingkungan tempat tinggal yang terbentuk dari sejumlah satuan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas umum, dan mendukung aktivitas fungsi tambahan di dalam kawasan perkotaan maupun pedesaan (Wijaya, 2015).

Melalui definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumah layak huni adalah kondisi rumah yang memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kriteria yang harus dipenuhi mencakup memiliki struktur rumah yang aman, tersedia sumber air bersih, pencahayaan matahari dan ventilasi udara yang memadai, pembagian ruangan yang sesuai, serta sanitasi yang baik.

3. METODE PENELITIAN

Pada topik penelitian ini, penulis mengadopsi metode kualitatif sebagai pendekatan, penggunaan metode ini dimaksudkan untuk menjelaskan serta menjabarkan terkait perencanaan pembangunan komponen fisik perumahan. Penelitian kualitatif merupakan suatu bentuk penelitian yang menginvestigasi dan merinci makna dari sejumlah individu atau kelompok orang yang terkait dengan isu-isu sosial yang dihadapi (Creswell, 2016:74). Selain itu, penelitian ini menggunakan jenis metode deskripsi analitis-kritis yang berguna untuk meneliti studi kasus analisis perencanaan program pembangunan sejuta rumah di Kabupaten Bantul. Penerapan metode ini dilakukan dengan proses pengumpulan data melalui metode studi kepustakaan, yang melibatkan penelaahan buku, bibliografi, notulensi, dan temuan yang relevan dengan permasalahan yang akan diinvestigasi (Sari, M, 2020). Dalam konteks penelitian kualitatif, proses pengolahan data dilaksanakan sejak proses pengumpulan data. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan mengkategorikan data berdasarkan pola dan urutan yang relevan dengan fokus penelitian. Lebih lanjut lagi, data yang sudah dikumpulkan akan ditelaah melalui penggunaan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengidentifikasi efektivitas program sejuta rumah. Selanjutnya, dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data triangulasi. Triangulasi data adalah sebuah metode pengumpulan data yang bersifat mengintegrasikan berbagai jenis data dan sumber informasi yang telah tersedia (Sugiyono, 2015:83). Pengambilan sumber tersebut dideskripsikan serta diuraikan dengan berpedoman pada pendapat para ahli. Oleh sebab itu, dengan penggunaan pendekatan kualitatif dalam meneliti penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan serta menguraikan fakta secara komprehensif terkait efektivitas kebijakan pemerintah pembangunan sejuta rumah dengan studi kasus analisis pembangunan hunian layak di Kabupaten Bantul tahun 2019.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Program Perencanaan Pembangunan Sejuta Rumah sebagai Solusi Mengatasi Permasalahan Tempat Tinggal di Kabupaten Bantul

Terdapat berbagai permasalahan tempat tinggal yang telah terjadi di Kabupaten Bantul. Namun, masalah utama yang dihadapi masyarakat Bantul dalam hal tempat tinggal ialah aspek ekonomi. Sebagaimana yang dirasakan masyarakat luas bahwa faktor utama dari permasalahan kepemilikan tempat tinggal ialah ekonomi. Mengenai hal tersebut kemudian muncul permasalahan berikutnya yaitu banyaknya masyarakat yang bertempat tinggal di bangunan tidak layak huni.

Tabel 4.1: Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di DI. Yogyakarta Tahun 2019 (Sumber : Kabupaten Bantul Dalam Angka, 2020)

Kabupaten/ Kota	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Prosentase (%)
Kulonprogo	333,781	7,462,000	17.39
Gunungkidul	381,538	13,115,000	12.92
Bantul	301,125	12,308,000	16.61
Sleman	382,868	9,017,000	7.41
Yogyakarta	495,562	2,945,000	6.84
DI. Yogyakarta	432,026	44,847,000	11.7

Data pada Tabel 4.1 menjelaskan bahwa, perolehan tingkatan kemiskinan di Kabupaten Bantul menempati peringkat ketiga di Yogyakarta sebagai daerah dengan penduduk miskin terbanyak. Angka kemiskinan yang cukup signifikan tingginya selaras dengan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Bantul, dimana penduduk setempat hanya memiliki fokus terhadap sektor perkembangan pertanian dikarenakan bentuk geografisnya masih terbelah pedesaan.

Program pembangunan sejuta rumah merupakan suatu upaya pemerintah Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR) yang bekerja sama dengan Pelaku Pembangunan Rumah dalam upaya menyediakan tempat tinggal layak huni. Program ini difokuskan pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MPR) yang dikhawatirkan atau dilihat telah memiliki hunian yang kurang layak. Program ini juga sebagai upaya untuk terus membangun kondisi ekonomi Indonesia. Program ini tidak hanya berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat mengenai tempat tinggal yang layak huni, tetapi juga secara otomatis membantu banyak industri dalam material alat pembangunan seperti kayu, semen, besi, genteng, dan lain sebagainya. Hal itu pula yang menjadikan program ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kemajuan ekonomi.

Program ini dikatakan telah berhasil dalam menggapai tujuan-tujuannya, terlihat dari pada data yang menyatakan bahwa pada tahun 2021 terdapat 826.500 unit yang telah dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Data tersebut telah membuktikan keberhasilan program ini dalam mencapai target yang besar serta membantu banyak sekali masyarakat, dan industri-industri lainnya. Target tersebut bahkan dinyatakan oleh Kementerian PUPR diharapkan selalu meningkat dan membantu lebih banyak masyarakat dan industri. Untuk memenuhi keinginan membantu masyarakat agar memiliki tempat tinggal layak huni dan tercepat pada target yang tepat, maka diperlukan

persyaratan untuk mendapatkan target sesuai yang diinginkan. Program ini dilaksanakan dengan hasil dua jenis, yaitu rumah tapak dan rumah susun. Rumah layak huni yang telah dikatakan memiliki keterangan-keterangan yang menyatakan bahwa tempat tersebut layak huni, yaitu struktur konstruksi atap, saluran air yang lancar, jaringan air bersih, jaringan listrik, saluran septic tank yang aman dan tidak mencemari lingkungan, serta berada pada lingkungan dan wilayah yang layak. Melihat dari implementasi program di Bantul, yang berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dirasakan masyarakat dengan didukung data mengenai tingginya angka *backlog* yang terjadi di Bantul. Dari pada permasalahan yang ada, pemerintah membuat kebijakan berupa program baru yaitu Program Sejuta Rumah di Kabupaten Bantul. Respon yang dirasakan dari pada perencanaan program tersebut cukup baik, namun diperlukan faktor-faktor pendorong agar program tersebut dapat terealisasi secara maksimal. Pemerintah daerah memiliki peran besar untuk mendorong proses program ini berjalan dengan baik, mencapai target yang tepat, serta menghasilkan suatu kepuasan serta keberhasilan yang dirasakan oleh masyarakat.

Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Penghuni Perumahan Produk Program Sejuta Rumah

Program Sejuta Rumah adalah salah satu dari beberapa program pemerintah Indonesia yang ditujukan untuk meningkatkan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dibutuhkan tingkat kepuasan penghuni perumahan Program Sejuta Rumah sebagai penentu keberhasilan program pemerintah ini. Kepuasan penghuni perumahan produk Program Sejuta Rumah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mengikuti, yaitu diantaranya:

1. Infrastruktur dan Fasilitas

Program Sejuta Rumah di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kepuasan penghuni terhadap program ini dipengaruhi oleh faktor-faktor penting, terutama Infrastruktur dan Fasilitas. Konsep teoritis ini mencerminkan eratnya hubungan antara ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, air bersih, dan fasilitas umum, dengan kesejahteraan penghuni. Teori Infrastruktur menekankan bahwa prasarana yang memadai menjadi landasan bagi kehidupan yang layak. Dalam konteks Program Sejuta Rumah, infrastruktur yang memadai tidak hanya mencakup akses jalan dan air bersih, tetapi juga fasilitas umum seperti taman dan tempat olahraga. Prasarana dan fasilitas yang tidak memadai dapat menghambat pemenuhan kebutuhan sehari-hari, menimbulkan ketidaknyamanan, dan berpotensi mempengaruhi kesejahteraan penghuni. Integrasi teori ini sangat penting untuk dimasukkan dalam implementasi Program Sejuta Rumah. Dengan memastikan akses terhadap infrastruktur yang memadai, pemerintah dapat menciptakan lingkungan hidup yang tentunya meningkatkan kepuasan penduduk dan mendukung kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya pembenahan infrastruktur ini harus terus dilakukan

agar program ini dapat memberikan dampak positif yang bertahan lama bagi warga, serta diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan infrastruktur Program Sejuta Rumah

2. Area atau Lokasi

Program Sejuta Rumah di Indonesia, bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan memahami bahwa kepuasan penghuni juga dipengaruhi oleh faktor area atau lokasi. Konsep teori aksesibilitas merupakan kunci dalam analisis faktor ini. Teori ini menekankan pentingnya akses yang baik terhadap pusat perekonomian, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum untuk meningkatkan kualitas hidup. Sebagai bagian dari program sejuta rumah, lokasi hunian yang strategis dan memiliki koneksi yang baik dengan berbagai fasilitas umum akan menentukan kepuasan penghuninya. Aksesibilitas yang optimal menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan masyarakat baik dari segi ekonomi maupun sosial. Analisis mendalam menunjukkan bahwa aspek aksesibilitas ini perlu diperhatikan dalam memilih tempat tinggal agar penghuni dapat dengan mudah mengakses layanan dan fasilitas penting. Integrasi teori aksesibilitas merupakan hal mendasar untuk meningkatkan kepuasan penghuni Program Sejuta Perumahan dan menciptakan lingkungan hidup yang berkontribusi positif terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.

3. Kualitas bangunan

Kualitas bangunan Program Sejuta Rumah Indonesia bertujuan untuk memberikan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan faktor kualitas bangunan merupakan salah satu aspek utama yang mempengaruhi kepuasan penghuni. Dalam konteks ini, teori kualitas arsitektur memberikan dasar penting untuk menganalisis efektivitasnya. Teori kualitas bangunan menekankan bahwa bangunan yang kuat, tahan lama, dan dirancang dengan baik akan memberikan dampak positif bagi penghuninya. Kualitas fisik perumahan menciptakan lingkungan yang memberikan rasa aman dan nyaman, serta berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup penghuninya. Analisis mendalam menunjukkan bahwa pembangunan perumahan yang memperhatikan kualitas bangunan dapat meningkatkan kepuasan penghuninya. Bangunan yang dirancang dengan baik tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung aspek psikologis dan emosional penghuninya. Hal ini dapat diimplementasikan dalam Program Sejuta Rumah dengan memastikan standar kualitas bangunan yang tinggi, sehingga menciptakan lingkungan perumahan yang memberikan manfaat positif bagi kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.

4. Kualitas pelayanan

Program Sejuta Rumah di Indonesia merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan akses terhadap perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menganggap kualitas pelayanan menjadi faktor penting dalam kepuasan penduduk. Konsep dari teori pelayanan publik memberikan dasar untuk menganalisis dampak pelayanan dalam program ini. Teori pelayanan publik menekankan pentingnya pelayanan yang baik dari pemangku kepentingan seperti pengembang *real estate*, pengelola perumahan, dan pemerintah daerah untuk kepuasan masyarakat. Analisis terperinci menunjukkan bahwa respons efektif terhadap keluhan dan perbaikan tepat waktu tidak hanya meningkatkan kepuasan warga namun juga kepercayaan terhadap program. Dalam implementasi Program Sejuta Rumah, penting untuk memastikan bahwa sistem yang merespons kebutuhan penduduk sudah ada. Menerima dan menanggapi pengaduan serta melakukan perbaikan dengan cepat tidak hanya menciptakan lingkungan hidup yang baik tetapi juga meningkatkan citra program. Mengintegrasikan teori pelayanan publik ke dalam strategi pelayanan dapat menjamin keberlanjutan dan keberhasilan Program Sejuta Rumah dalam jangka panjang.

5. Proses seleksi dan penempatan

Proses seleksi dan penempatan rencana Program Sejuta Rumah Indonesia merupakan solusi pemerintah untuk meningkatkan akses terhadap perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dimana kepuasan penghuni sangat bergantung pada proses seleksi yang transparan dan adil. Meskipun teori keadilan menekankan pentingnya keadilan dalam proses seleksi, konsep akuntabilitas memerlukan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional pemerintah. Analisis mendalam menunjukkan bahwa ambiguitas dan ketidakadilan dalam proses seleksi dapat menimbulkan ketidakpuasan warga dan mempertanyakan integritas dan keadilan program Sejuta Rumah. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk menjaga keadilan dan akuntabilitas di semua tahap proses seleksi dan penempatan. Dengan menerapkan prosedur yang transparan, adil, dan akuntabel, program ini mampu menjamin kepuasan warga. Pemahaman prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Sejuta Rumah akan membantu meminimalkan potensi konflik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan program.

6. Prasarana Keamanan dan Fasilitas Parkir

Faktor Prasarana Keamanan dan Fasilitas Parkir dalam Program Sejuta Rumah menjadi kunci untuk memahami kepuasan penghuni. Teori keamanan lingkungan memberikan dasar analisis yang menilai dampak faktor-faktor ini terhadap kesejahteraan dan kepuasan penduduk. Teori keselamatan lingkungan menekankan perlunya menciptakan lingkungan yang aman untuk meningkatkan kualitas hidup dan kepuasan penghuni. Dalam Program Sejuta Rumah, ada tidaknya sistem

keamanan seperti penjaga gerbang menjadi faktor yang mempengaruhi rasa aman warga. Analisis terperinci menunjukkan bahwa keamanan lingkungan hidup menciptakan iklim yang meningkatkan kesejahteraan psikologis penghuninya. Tempat parkir yang memadai juga menjadi faktor penting. Teori ini menekankan bahwa ketersediaan fasilitas parkir yang memadai dapat mencegah konflik antar warga dan menjaga kenyamanan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan Program Sejuta Rumah, pemerintah harus memprioritaskan infrastruktur keamanan dan fasilitas parkir untuk menciptakan lingkungan hidup yang aman, nyaman dan mendukung kepuasan penghuni jangka panjang.

7. Keberlanjutan Program

Keberlanjutan Program Sejuta Rumah di Indonesia merupakan sebuah inisiatif pemerintah untuk meningkatkan akses terhadap perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, berdampak pada kepuasan penduduk. Dari perspektif ini, teori pembangunan berkelanjutan memberikan dasar untuk menganalisis dampak keberlanjutan suatu program. Teori pembangunan berkelanjutan menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam program. Setelah dianalisis secara mendalam, penulis menemukan bahwa keberlanjutan Program Sejuta Rumah tidak hanya mencakup pembangunan fisik perumahan, namun juga pemeliharaan perumahan, pengembangan fasilitas, dan peningkatan kualitas infrastruktur. Dalam melaksanakan Program Sejuta Rumah, pemerintah perlu memastikan strategi berkelanjutan yang mencakup pemeliharaan dan pembangunan berkelanjutan. Fokus hanya pada aspek perumahan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan dapat melemahkan kepuasan penghuni. Mengintegrasikan teori pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program dapat memberikan dampak positif jangka panjang, mencapai kepuasan penduduk yang berkelanjutan, dan menyeimbangkan kebutuhan masyarakat dengan kelestarian lingkungan yang dapat dipertahankan.

Tabel 4.2: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bantul Tahun 2015
(Sumber: Forum Pendataan Sejuta Rumah DIY, 2018)

No.	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah RTLH	
			Versi BDT (Unit)	Versi Pemda (Unit)
1	Srandakan	9,310	46	222
2	Sanden	10,315	113	233
3	Kretek	9,697	26	81
4	Pundong	11,007	65	146
5	Bambanglipuro	12,842	73	122
6	Pandak	15,859	144	230
7	Pajangan	9,918	369	578
8	Bantul	18,284	84	83
9	Jetis	16,964	81	277
10	Imogiri	19,376	305	1484
11	Dlingo	12,200	117	717
12	Banguntapan	31,470	142	213
13	Pleret	14,366	156	254
14	Piyungan	15,838	218	354
15	Sewon	28,818	134	151
16	Kasih	28,580	202	261
17	Sedayu	14,807	88	297
JUMLAH		279,651	2,363	5,703

Pada tabel 4.2, dijelaskan bahwa di Kabupaten Bantul sendiri masih memiliki perhatian khusus terhadap banyaknya rumah yang masih dikategorikan tidak layak huni. Pemerintah harus mempertimbangkan faktor-faktor di atas saat mengimplementasikan Program Sejuta Rumah untuk memastikan bahwa penghuninya puas dengan perumahan yang disediakan di bawah program tersebut. Sebagai upaya pengendalian perumahan bersubsidi Program Sejuta Rumah agar terciptanya kepuasan bagi masyarakat, sebaiknya pemerintah lebih selektif dalam memilih memberikan subsidi kepada masyarakat, dan pemerintah harus memperhitungkan pembiayaan perumahan bagi MBR agar rumah hasil

Program Sejuta Rumah ini dapat tepat sasaran dalam memberikan akses MBR pada rumah layak huni melalui Program Sejuta Rumah.

Upaya Pemerintah Dalam Memastikan Program Pembangunan Sejuta Rumah Memberikan Manfaat Jangka Panjang Bagi Masyarakat

Program Sejuta Rumah adalah suatu program pemerintahan yang mempertemukan berbagai aktor yang terlibat dalam penyediaan perumahan yaitu negara, pemerintah daerah, badan pengembangan usaha, perbankan dan masyarakat agar saling berkolaborasi untuk melakukan pembangunan rumah khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini diharapkan dapat membangun satu juta rumah setiap tahunnya dengan mengembangkan strategi untuk melaksanakan program sejuta rumah berupa rumah susun, bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya, penyediaan bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, FLPP KPR, SSB, SBUM, dan instruksi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. (PP No. 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan MBR). Program Pembangunan Sejuta Rumah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kekurangan perumahan yang layak di Indonesia. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya agar program ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, seperti :

1. Melakukan perencanaan yang matang dalam implementasi program pembangunan sejuta rumah. Meliputi pemetaan kebutuhan hunian, lokasi yang strategis, perencanaan infrastruktur pendukung seperti jalan, air bersih, dan sanitasi, serta ketersediaan fasilitas sosial dan ekonomi di sekitarnya.
2. Memastikan kualitas rumah hunian yang dibangun dalam program sejuta rumah memenuhi standar kualitas yang baik. Meliputi keamanan struktur bangunan, ketersediaan fasilitas dasar seperti air bersih dan sanitasi, akses listrik, serta desain yang sesuai dengan kebutuhan penghuni.
3. Membangun infrastruktur pendukung seperti jalan, saluran air, sanitasi, dan sarana pendidikan serta kesehatan di sekitar lokasi pembangunan rumah. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, masyarakat akan dapat memanfaatkan fasilitas secara optimal dan mampu meningkatkan kualitas hidup.
4. Mendampingi dan melakukan pelatihan kepada masyarakat yang mendapatkan rumah melalui program ini meliputi keterampilan rumah tangga, manajemen keuangan, atau keterampilan usaha untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas hidup mereka dan memanfaatkan rumah yang mereka dapatkan secara optimal.
5. Memberikan pemahaman kepada penerima program mengenai pentingnya perawatan dan pemeliharaan rumah yang mereka huni. Dengan memberikan pemahaman ini, diharapkan rumah-rumah yang dibangun akan tetap dalam kondisi baik dan layak huni dalam jangka panjang.
6. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program sejuta rumah untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran program tercapai. Dengan melakukan

evaluasi, pemerintah dapat melakukan perbaikan jika ditemukan kendala atau permasalahan dalam implementasi program ini. Dengan mengimplementasikan program ini secara efektif, pemerintah dapat memastikan bahwa Program Perencanaan Pembangunan Sejuta Rumah memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, seperti pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan peningkatan kualitas hidup.

5. PENUTUP

Dengan merujuk pada uraian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa program Perencanaan Pembangunan Sejuta Rumah merupakan tindakan strategis pemerintah dalam menyelesaikan persoalan tempat tinggal di Kabupaten Bantul. Permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat Bantul adalah masalah ekonomi, yang menyebabkan banyaknya masyarakat tinggal di bangunan tidak layak huni. Program ini dilaksanakan oleh Kementrian PUPR bekerja sama dengan Pelaku Pembangunan Rumah untuk menyediakan rumah layak huni yang memenuhi standar bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program ini memiliki dampak yang positif, bukan hanya terhadap kesejahteraan masyarakat terkait tempat tinggal layak huni, tapi juga terhadap industri-industri yang terlibat pada pembangunan, seperti industri kayu, semen, besi, dan genteng. Selain itu, program ini juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemajuan ekonomi.

Demi memastikan kepuasan penghuni perumahan yang dibangun melalui Program Sejuta Rumah, ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan seperti infrastruktur dan fasilitas, area atau lokasi perumahan, kualitas bangunan, kualitas pelayanan, proses seleksi dan penempatan, keberlanjutan program, serta prasarana keamanan dan fasilitas parkir. Upaya pemerintah dalam memastikan program sejuta rumah memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat mencakup perencanaan yang matang, memastikan kualitas rumah yang dibangun, membangun infrastruktur pendukung, memberikan pelatihan kepada penerima program, memberikan pemahaman tentang perawatan dan pemeliharaan rumah, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Kehadiran program sejuta rumah menawarkan solusi potensial dalam mengatasi krisis akan hunian layak, namun perlu diperhatikan lagi terkait akses dan keadilan terhadap cakupan program ini, dimana perlu kecermatan serta pemantauan ketat guna terciptanya sasaran tepat dalam tujuan program ini. Diperlukan kolaborasi intensif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, agar dapat memenuhi aspek keberlanjutan lingkungan dan inklusivitas sosial dalam setiap tahap pembangunan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Agus, F., Fanny, S., & Muliana, R. (2020). *Efektivitas Implementasi program Perumahan Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Kecamatan Tenayan Raya)*. JURNAL SAINTIS, 20(02), 101-109. [https://doi.org/10.25299/saintis.2020.vol20\(02\).5](https://doi.org/10.25299/saintis.2020.vol20(02).5)
- BPS. (2013). *Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Hasil Sensus Penduduk 1961-2010* : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- BPS. (2016). *Pertumbuhan Upah Nominal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2008-2009* : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- BPS. (2018). *Forum pendataan sejuta rumah DIY, 2018* : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ding, D. (2014), *Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan*. Jurnal Ilmu Pemerintah, 02(02)
- Erwin, S. Putra (2022), *Maisona 2 Edisi 24 Th IV Mulyani, W.P. (2016). Dinamika Kesejahteraan Penduduk di Banjarnegara*. Majalah Geografi Indonesia, 30(1), 96-103.
- Gofur, R. R., & Jumiati, I. E. (2021). *Analisis Kebijakan Program Sejuta Rumah: Sebuah Tinjauan Literatur*. Administratio, 12(2), 113-120.
- Lin, T., et al. (2015). *Spatial Pattern of Urban Functional Landscape along an UrbanRural Gradien: A case Study in Xiamen City, China*. Elsevier: International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 46, 22-30.
- Nata, P.D. (2020), *Tingkat Kepuasan Penghuni Perumahan Produk Program Sejuta Rumah Terhadap Penyediaan Komponen Fisik Perumahan (Studi Kasus : Perumahan Permata Asri Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)*
- Noor, Isran. (2013). *Buku Pintar Penyuluh Pertanian*. Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- Octavia, Z. P. (2018). *Efektivitas Penyaluran Kredit Konstruksi Pt Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Terhadap Program Sejuta Rumah Bersubsidi (Studi Kota Surakarta Tahun 2017)*.
- Pinuji, S., Suhattanto, M.A., & Arianto, T. (2018). *Dinamika dan Tantangan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pulau Kecil*. Bhumi, 4(1), 104- 116.
- Sagitarini, B. S. (2017). *Implementasi Kebijakan Sosial Pemerintah Daerah tentang Perumahan Murah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi Pada*

-
- Perumahan Griya Mustikasari Kota Bekasi*). (Universitas Muhammadiyah Malang).
- Saputri, Zaenuri. *Tata Kelola Program Sejuta Rumah dalam Perpektif Collaborative Governance (Studi pada Program Sejuta Rumah di Kabupaten Bantul, DIY)*
- Saragih, R. (2018). *Efektivitas Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan*. Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal, 7(1), 77. <https://doi.org/10.31289/jap.v7i1.1266>
- Sari, M. (2020). *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*. Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, 6(1), 41-53.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suryani, Erfina Indah. (2014). *Efektifitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar*. Skripsi Thesis. Riau : Universitas Islam Negeri Riau Sultan Syarif Kasim Riau.
- Wijaya, (2015). *Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam Penentuan Lokasi Perumahan di Kota Depok*. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh November.
- Wulandari, E., & Aulia, F. (2018). *Pengaruh Morfologi Kota terhadap Ekologi Perkampungan Tradisional di Kota Banda Aceh, Indonesia*. Jurnal Arsitektur Zonasi, 1(1), 45-54.
- Yanto, K (2017), *Penerapan Metode Scoring System Dalam Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni (Studi Kasus : Desa Sungai Paku)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.